



## Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia

Sulaiman<sup>1\*</sup>, Rusdinal<sup>2</sup>, Nurhizrah Gistituati<sup>2</sup> & Azwar Ananda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*email.sulaiman\_unp@yahoo.com

### Abstract

*This study describes the contemporary education system in the Republic of Egypt. Since the revolutionary era of 1952, Egypt has sought to expand access to education opportunities for the community as a prerequisite for the country's social and economic development. In this study, a literature review was conducted to obtain and describe Egyptian educational information based on references from various sources. The results show that Egypt has an education system with two parallel structures, namely the secular structure and the religious structure of Al-Azhar. The secular structure is regulated by the ministry of education while the religious structure of Al-Azhar by the ministry of Al-Azhar affairs or commonly referred to as the ministry of religion in other countries. In the description of this article, it can be seen the similarities and differences between the education system in Egypt compared to Indonesia. Each country's education system has advantages and disadvantages, so the two countries can take each other's best practices to be adopted and taken into consideration in the development of the education system.*

**Keywords:** Education System; Egypt; Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini menggambarkan sistem pendidikan kontemporer yang ada di Republik Mesir. Sejak era revolusi tahun 1952, Mesir mengupayakan perluasan kesempatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat sebagai pemenuhan prasyarat dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Dalam penelitian ini, *literature review* dilakukan untuk memperoleh dan mendeskripsikan informasi pendidikan Mesir berdasarkan referensi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan Mesir memiliki sistem pendidikan dengan dua struktur paralel, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler diatur oleh kementerian pendidikan sementara struktur keagamaan Al-Azhar oleh kementerian urusan Al-Azhar atau biasa disebut sebagai kementerian agama di negara lain. Dalam uraian artikel ini dapat dilihat kesamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan di Mesir dibandingkan dengan Indonesia. Masing-masing sistem pendidikan Negara tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan, maka kedua negara bisa saling mengambil *best practice* untuk diadopsi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem pendidikan.

**Kata kunci:** Sistem Pendidikan; Mesir; Indonesia.

---

**Diserahkan:** 02-07-2021 **Disetujui:** 15-09-2021. **Dipublikasikan:** 19-09-2021

**Kutipan:** Sulaiman, S., Rusdinal, R., Gistituati, N., & Ananda, A. (2021). Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 395-413.  
doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.4956>

## I. Pendahuluan

Dalam Bahasa Indonesia, kata Mesir berasal dari istilah Arab *Miṣr* atau [mi'sr] pengucapannya dalam bahasa Arab Mesir: [mes'r]; dalam Arab klasik disebut dengan “مصر” demikian juga dalam Al Quran serta menjadi nama resmi Negara Mesir atau *Egypt* dalam Bahasa Inggris (PBB). Mesir juga merupakan negara terbesar ke-30 dunia. Republik Arab Mesir dengan luas sekitar 1 juta km persegi berpenduduk sekitar 67.273.906 jiwa pada tahun 1997. Pertumbuhan penduduk termasuk tertinggi di dunia yaitu 2,75% pertahun 1970. Menurut Ananda (2018), pesatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada masyarakat Mesir terutama pada struktur sosialnya.

Secara geografis, Republik Arab Mesir adalah negara yang terdapat pada benua Afrika bagian timur laut di sebelah Libya dan bagian selatan bersebelahan dengan Sudan. Negara tersebut terletak pada garis lintang 22 ° dan 32 ° N, dan garis bujur 25 ° dan 35 ° E. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Peta Benua Afrika

Selanjutnya daratan Mesir dilalui oleh sungai nil yang membelah negeri tersebut dari utara sampai ke selatan, sehingga membagi Negara menjadi dua daerah Mesir atas dan Mesir bawah. Terdapat 26 provinsi yang membagi pada kedua daerah tersebut menjadi kegubernuran. Selanjutnya terbagi menjadi 150 kabupaten, 808 buah kecamatan dengan luas daerah yang berbeda. Desentralisasi menjadi sistem pemerintahan semenjak tahun 1979, menurut Nur (2002) sistem tersebut yang memberikan ruang kekuasaan gubernur sebagai wakil presiden di daerah, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kebijakan serta keputusan pemerintah dalam kaitan dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah terutama masalah sosio-ekonomi.

Dalam hal peradaban, Mesir dikenal dengan peninggalan budaya kuno dan monumen kuno yang terkenal megah di dunia dan mendapat pengakuan luas sebagai pusat utama budaya dan politik di wilayah Timur Tengah terutamanya Arab. Dikenal juga sebagai pusat kebudayaan dunia zaman purba, terbukti dengan banyaknya peninggalan-

peninggalan kebudayaan kuno seperti sphinx, obelisk, piramida, dan hieroglif. Giza dan Sakara menjadi daerah yang terdapat banyak piramida. Sementara di Sakara Sphinx bisa banyak terlihat yang dibangun pada 5000 tahun yang silam. Piramida sendiri sebenarnya adalah kuburan para raja sementara Sphinx adalah patung berbadan singa dan berkepala manusia yang dimaksudkan untuk melindungi makan raja. Sementara itu obelisk yang terbuat dari batu merupakan tugu berbentuk segi empat. tulisan dan lukisan pada peninggalan-peninggalan kuno tersebut disebut dengan hieroglif.

Agama sangat identik dalam kehidupan di Mesir. Dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi keseharian di masyarakat seperti azan yang dijadikan sebagai patokan waktu kegiatan dikumandangkan lima kali setiap harinya. Kota Kairo dikenal juga dengan menara-menara masjid dan beberapa gereja. Pada era kekinian terjadi transformasi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat, kasih sayang serta pemaaf. Hal tersebut dikarenakan ajaran Islam berhasil menanamkan nilai-nilai sosial budaya dan bahasa mereka yang berkeadaban.

Dalam konstitusi atau perundang-undangan, semuanya diharuskan sejalan dengan hukum Islam. Melalui penetapan Kementerian Agama, mazhab yang diakui negara secara resmi adalah mazhab Hanafi. Pelatihan-pelatihan keahlian untuk menjadi imam banyak dilakukan oleh Universitas Al-Azhar. Komite Al-Azhar memiliki kewenangan untuk berfatwa terhadap masalah-masalah agama. Komposisi penduduk Mesir 90 % beragama Islam dan didominasi Sunni sementara sebagian lain menganut paham Sufi lokal. Agama Kristen dianut sekitar 10% dan penganut Kristen 78% di dominasi Koptik (Protestan Koptik, Ortodoks dan Katolik Koptik).

Dalam bidang pendidikan modernisasi diawali dengan pengenalan kemajuan Iptek yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis di saat melakukan invasi ke Mesir. Pencapaian Napoleon Bonaparte dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, belakangan menjadi inspirasi para pembaharu dan pemimpin Mesir guna melakukan terobosan-terobosan sistem pendidikan di Mesir di mana sebelumnya sempat mengalami stagnasi. Pada sisi ekonomi Mesir menggantungkan pada hasil pada pertanian, pertambangan, peternakan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

Setelah kemerdekaan negara Mesir dari penjajahan Perancis (28 Februari 1922), berbagai kekacauan politik yang tak berujung terjadi dalam politik negara Mesir, dan hal ini tentu saja mempengaruhi politik pendidikannya. Meskipun demikian, pendidikan tetap dapat dijalankan dengan cukup baik.

Besarnya jumlah penduduk yang bermukim di daerah perkotaan menjadi karakteristik masyarakat di Mesir. Sehingga hal tersebut berakibat pada angka pengangguran meningkat, di mana tahun 1987 saja sudah mencapai 11% dari total tenaga kerja, hal tersebut salah satunya karena keterbatasan lahan pertanian di Mesir untuk menyerap tenaga kerja dan kapasitas produksi yang rendah.

Berikutnya berdasarkan hasil survei mengenai tingkat pendidikan warga Negara Mesir dilakukan pada tahun 1986 menunjukkan bahwa 4,1% warga memiliki gelar universitas. Persentase penduduk dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah 21,7%. Jumlah wanita yang buta huruf 70% lebih tinggi dari pria buta huruf ( Nur, 2002).

Selanjutnya dalam penelitian Saleh (2015) diungkapkan bagaimana pemerintah Mesir berupaya untuk meningkatkan partisipasi siswa lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang masih minim, yaitu hanya 25-28 persen dari total lulusan sekolah menengah, di samping untuk mengurangi konsentrasi siswa yang kebanyakan melanjutkan pada universitas di kota-kota besar saja. Berdasarkan data tahun 2010, total ada 2.646.000 siswa yang terdaftar di semua tingkat pendidikan. Universitas Al-Azhar menjadi salah satu pilihan favorit dari 23 universitas negeri. Di samping itu siswa juga memilih dan masuk di 19 universitas swasta, 18 lembaga publik pendidikan tinggi dan 81 lembaga tinggi swasta. Dalam hal tersebut pemerintah Mesir juga berusaha meningkatkan daftar siswa yang masuk di perguruan tinggi dari angka 2,5 juta menjadi 2,8 juta siswa pada tahun berikutnya walaupun dalam keadaan politik/pemerintahan yang belum stabil upaya tersebut tetap dilakukan.

Dengan dinamika tersebut, sistem pendidikan negara Mesir sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut guna melihat bagaimana gambaran sistem pendidikan Mesir tersebut dan dilanjutkan dengan perbandingannya pada sistem pendidikan Indonesia. Kemudian *best practice* apa yang bisa diambil dari sistem pendidikan Mesir.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap berbagai informasi penting terkait sistem pendidikan Mesir dengan segala indikator dan dinamikanya sekaligus sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang referensial. Penulis mempersiapkan tinjauan literatur dari berbagai sumber berupa buku cetak maupun sumber elektronik berupa artikel yang terdapat pada jurnal bereputasi dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, jurnal nasional maupun internasional. Dalam menganalisis artikel tersebut, digunakan metode *critical appraisal* yang digunakan untuk menjadi landasan teori dalam melihat perbedaan, persamaan dan kekurangan analisis yang terdapat dalam artikel tersebut.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Sistem pendidikan negara Mesir**

Sistem pendidikan negara Mesir sebagaimana di negara-negara lainnya di dunia, dipengaruhi oleh berbagai hal. Sebagai negara dengan peradaban tertua di dunia, pendidikan di Mesir telah mengalami berbagai revolusi dan reformasi. Faktor utama yang

sangat berperan adalah faktor sejarah, faktor geografi, faktor demografi, dan faktor politik.

### **1. Landasan Filsafat Pendidikan**

Untuk membentuk tujuan pendidikan, landasan pendidikan sangat diperlukan dalam menentukan arah kemajuan yang diinginkan. Landasan tersebut adalah landasan filosofis, yang merupakan asas-asas dalam penentuan tujuan dan arah pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik sehingga dari awal hendaknya ditentukan filosofis pendidikan yang akan dikembangkan (Ilyas, 2017).

Pada sistem pendidikan Mesir pendidikan ditujukan untuk mendidik akal dan jiwa serta untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan cara mengembangkannya dalam proses yang diikuti anak didik sesuai batas-batas yang sesuai dengan perkembangan mereka. Diharapkan proses pendidikan tersebut mampu membentuk muslim dengan karakter yang seimbang dan tidak hanya mengedepankan ranah kognitif (inteligensi) namun diselaraskan dengan ranah afektif (emosional) dan psikomotorik (*skill*).

### **2. Politik dan Tujuan Pendidikan.**

Dalam pengembangan sistem pendidikan, pemerintah Mesir menyatakannya secara ilmiah dengan menerapkan konsep yang terstruktur, menjalankan fungsi manajemen yang terukur. Kemudian peninjauan ulang (evaluasi) dari proses sistem berjalan tetap mesti dilakukan untuk menyempurnakan program-program pendidikan. Dengan demikian ketika pemerintah Mesir membuat program wajib belajar, maka indikatornya harus terlihat dari kemampuan masyarakat yakni pandai dalam hal baca tulis serta memiliki kemampuan terdidik dalam berpikir dan bertindak. Masyarakat juga dituntut mampu dalam pemanfaatan teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan, serta produktif guna menghasilkan produk yang dibutuhkan banyak kalangan (El Nagdi & Roehrig, 2020).

Dalam hal ini, telah dinyatakan juga oleh kementerian pendidikan Mesir sebagaimana dijelaskan dalam Ananda (2018) dengan terperinci terkait tujuan utama pendidikan sebagaimana berikut:

- a. Tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan demokrasi dan penciptaan *egalitarian* dalam persamaan hak dan kesempatan setiap individu secara demokratis.
- b. Pendidikan juga ditujukan dalam membangun bangsa secara kompleks, guna terciptanya hubungan yang fungsional pendidikan antara *output* dengan kebutuhan pasar pekerjaan.
- c. Tujuan pendidikan selanjutnya juga mesti diarahkan untuk menguatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap bangsanya, serta penguatan akan identitas dan budaya Arab.

- d. Proses pendidikan dilakukan untuk menggiring masyarakat ke arah pendidikan seumur hidup dalam peningkatan kualitas diri sendiri.
- e. Cakupan pendidikan harus melingkupi pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama kemampuan baca tulis, berhitung, menguasai bahasa-bahasa selain bahasa arab, karya seni, serta lingkungan hidup.
- f. Tujuan pendidikan harus dijadikan sebagai *frame* dalam pengembangan kurikulum dan evaluasinya serta kerja sama program-program yang dibuat.

### 3. Struktur Pendidikan

Secara struktur, pendidikan Mesir terlihat sentralistis, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tahapan jenjang sekolahnya sebagai berikut:

#### a. Pendidikan Dasar.

Dalam pendidikan dasar, Mesir memberlakukan wajib belajar selama 9 tahun dengan rentang usia pendidikan antara usia 6 dan 14. Seluruh satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam mengatur kebijakan sekolah masing-masing. Didasarkan pada data statistik tahun 1999/2000, persentase partisipasi pra-siswa SD sebesar 16% kemudian terjadi peningkatan 24% pada tahun 2009. Seluruh pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta. Departemen bertugas untuk memilihkan buku pelajaran dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini, yang menjadi pedoman ukuran jumlah siswa prasekolah (Ilyas, 2017) oleh Departemen Pendidikan digariskan tidak dibenarkan melebihi 45 siswa.

Departemen juga mendapat *support sistem* dari badan keuangan internasional seperti Bank Dunia untuk peningkatan akses kesempatan bersekolah bagi anak-anak usia dini disertai dengan membangun kualitas dan kapasitas guru sebagai peningkatan kualitas pembelajarannya (Saudi, 2020). Selanjutnya tahapan persiapan sekolah menengah pertama atau tiga tahun yang lama menjadi lapis kedua wajib belajar dalam pendidikan dasar. Urgensi penyelesaian tingkat pendidikan dasar adalah untuk mengantisipasi terjadinya buta huruf yang diidentifikasi sebagai persoalan berat pada siswa dalam pencapaian keahlian *life skills* yang pada gilirannya disinyalir bisa mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan.

#### b. Pendidikan Menengah

Jalur pendidikan menengah terdiri dari tiga yaitu: umum, kejuruan/ teknis dan *dual sistem*. Tahap pendidikan umum dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan berlangsung 3-5 tahun Kemudian untuk pendidikan kejuruan yang dimaksud mewakili sekolah yang dikenal dengan *Kohli Mubarak*. Selanjutnya untuk sistem ganda pendidikan kejuruan tingkat menengah diprogramkan selama 3 tahun. Untuk mendapatkan sertifikat lulus para siswa diharuskan mengikuti ujian nasional yang dilaksanakan pada akhir tahap sekunder.

Pada tahun 2004, jumlah siswa yang mampu melewati tahap persiapan sebesar 77,3% dan didaftarkan dalam tingkat sekunder. Untuk siswa juga dilakukan penilaian formatif dan sumatif pada tahun pertama dan untuk tahun kedua dan tiga kualifikasi para siswa untuk mendapatkan nilai rata-rata akhir tahun dengan ujian berstandar nasional dan diberikan sertifikat Pendidikan Menengah Umum (*Thanawiya Amma*), sekaligus menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang universitas.

c. Pendidikan Tinggi

Terkait sistem Pendidikan Tinggi di Mesir memiliki cakupan yang sangat luas. Di mana sebesar 30% dari populasi penduduk Mesir usia pelajar/ mahasiswa melanjutkan pendidikan ke universitas (M Nurul Ikhsan Saleh, 2015). Dalam hal ini tingkat pendidikan tersier tersebut diawasi langsung oleh Departemen Pendidikan Tinggi. Lembaga pendidikan yang terdapat saat sekarang ini berupa 17 perguruan tinggi (universitas) umum dan 51 lembaga pendidikan masyarakat non-universitas, dan untuk perguruan tinggi swasta terdapat 89 lembaga.

#### **4. Jenis-jenis pendidikan**

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pendidikan di Negara Mesir akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Pendidikan Formal.

Secara umum terdapat dua penanggung jawab untuk sistem sekolah formal, yakni kementerian pendidikan untuk sekolah struktur sekuler, dan kementerian Al-Azhar untuk sistem sekolah Al-Azhar. Di samping kedua struktur tersebut, terdapat pula jenis sekolah yang diperuntukkan untuk sebagian anak-anak khusus misalnya, anak-anak disabilitas masuk ke sekolah berkebutuhan khusus. Sementara bagi yang memiliki minat militer dapat memasuki sekolah militer, serta terdapat pula anak-anak muda mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga atau badan tertentu setelah ia meninggalkan sekolah regulernya.

1) Sistem Sekolah Umum.

Program wajib belajar di Mesir berlaku sampai dengan *Grade 8* yang dikenal sebagai pendidikan dasar yang meliputi pendidikan TK dan *play group* sebelum memasuki pendidikan dasar, namun jumlahnya minim dan hanya terdapat di daerah perkotaan. Pembagian jenjang pendidikan dasar yang dikenal dengan Sekolah Dasar mulai dari *Grade 1* sampai *Grade 5*, kemudian jenjang kedua terdapat sekolah persiapan, mulai dari *Grade 6* sampai *Grade 8*.

Setelah menjalani pendidikan dasar wajib 8 tahun, terdapat tiga pilihan bagi murid-murid yaitu: memasuki jalur sekolah menengah umum, masuk jalur sekolah teknik menengah 3 tahun, atau masuk ke sekolah teknik 5 tahun. Proses pendidikan di

sekolah menengah umum yaitu tahun pertama (*Grade 9*) merupakan kelas gabungan (bersama). Sedangkan pada *grade 10* dan *grade 11* murid dapat memilih dan menentukan bidang sains dan non-sains (IPA vs Non-IPA) yang akan ditekuninya.

Selanjutnya pendidikan universitas dan pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang mengikuti sistem akademik secara umum. Pada lembaga perguruan tinggi proses pendidikan berlangsung selama dua, empat atau lima tahun sesuai pilihan mahasiswa dengan bidang dan programnya. Pada tahun 1999, mulai dibuka bagi alumni sekolah teknik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk Mesir yang begitu cepat, berdampak pula pada peningkatan kualifikasi pendidikan, sehingga berakibat pula pada peningkatan jumlah murid. Sistem Sekolah Al-Azhar.

Dalam sistem sekolah Al-Azhar penekanan pada pembelajaran Agama Islam yang lebih dirasakan dominasinya namun untuk kurikulum mata pelajaran umumnya relatif sama dengan sekolah sekuler, perbedaan dengan sistem sekolah sekuler padat singkat pendidikan dasar yaitu *Grade 10* dan *11* berlaku untuk seluruh murid, kemudian di akhir *grade 11*, murid diberikan pilihan untuk masuk dua tahun lagi ke sekolah umum, atau ke sekolah agama. Pada tingkat universitas, fakultas-fakultasnya sistem sekolah Al-Azhar boleh dikatakan sama dengan sistem pendidikan sekuler namun lebih menekankan pada aspek keagamaan pada kurikulumnya.

## 2) Pendidikan Teknik Kejuruan (Vokasional)

Upaya untuk mengembangkan pendidikan kejuruan (vokasional) dan pendidikan teknik supaya lebih berpengaruh luas diawali tahun 1950-an. Jumlah lembaga vokasional dan teknik meningkat dari 134 sekolah (dengan 31.800 siswa) pada tahun 1952 menjadi 460 sekolah (dengan 115.600 siswa) pada tahun 1960.

### b. Pendidikan Nonformal

Definisi pendidikan non formal adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di luar sistem formal yang terstruktur dan terencana yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan pendidikan. Pendidikan nonformal ditujukan kepada berbagai kalangan mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, petani atau pedagang, maupun pengrajin; termasuk apakah dari kalangan orang kaya atau miskin. Maka kebanyakan program yang dibuat lebih dikonsentrasikan pada pendidikan nonformal dalam aspek yang disesuaikan dengan objek peserta didik.

Kementerian perburuhan pada tahun 1967, mulai menyelenggarakan program-program pendidikan dan penataran bagi yang telah menamatkan pendidikan tingkat dasar, remaja putus sekolah formal dalam rentang usia antara 12 dan 18 tahun. Program ini memberikan pelatihan vokasional yang cocok yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk lingkungan dan masyarakat (Maman & Falah, 2018). Pendidikan berlangsung biasanya selama sembilan bulan atau tujuh bulan dan di lakukan di pusat-pusat pelatihan

vokasional. Kemudian dilanjutkan pada tempat (*workshop*) unit produksi. Selanjutnya peserta pelatihan akan ditempatkan pada sektor pemerintah atau swasta untuk bekerja secara profesional.

Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan terhadap 33 lembaga atau pusat pelatihan di berbagai provinsi. Pusat-pusat pelatihan tersebut melakukan peningkatan keterampilan para teknisi dengan penyelenggaraan program latihan cepat bagi *worker* yang masih pemula dengan memagangkan mereka pada industri yang relevan. Program *semi-skilled* ini kebanyakan diikuti oleh kalangan pemuda usia 17 tahun-an dengan durasi kegiatan selama enam bulan. Dalam pemagangan tersebut juga diikuti oleh siswa yang telah menamatkan pendidikan dasar serta mereka yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan teknik formal. Lama pemagangan sekitar tiga tahun dan guna meningkatkan performa karyawan dalam bekerja, Seleksi karyawan dilakukan perusahaan terhadap pekerja yang telah berpengalaman paling tidak lima tahun untuk diikutkan dalam *training* yang dilakukan pada malam hari dalam waktu tiga bulan (Saudi, 2020).

## **5. Manajemen Pendidikan**

### **a. Otoritas**

Kementerian negara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di Mesir. Dalam aspek perencanaan pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan (Stopikowska & El-Deabes, 2012). Kemudian pada tingkat provinsi tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana tahap implementasinya, di mana mereka bertanggungjawab melengkapi, membangun dan melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan berlangsung di daerah teritorialnya.

Secara berkala menteri melakukan rapat dengan dewan-dewan kesekretariatan dan memimpin sidang dengan dewan universitas untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban atas perencanaan dan pembuatan kebijakan pendidikan. Sebagaimana struktur organisasi di pusat kementerian, struktur organisasi provinsi pada dasarnya juga mirip namun hanya lebih sederhana (Abou-Warda, 2015). Jaringan supervisor dan administrator di Mesir tersebar ke dalam 140 distrik pendidikan.

Selanjutnya tanggung jawab kementerian Al-Azhar diarahkan bagaimana mengeluarkan kebijakan serta perencanaan pendidikan yang seimbang pada universitas Al-Azhar serta kebijakan dan perencanaan untuk perguruan tinggi dan sekolah lainnya dalam lingkup Al-Azhar.

### **b. Pendanaan**

Alokasi dana pendidikan setelah tahun 1970 mulai ditingkatkan jumlahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran masyarakat tahun 1984 dalam membiayai pendidikan mencapai EL.186,5 juta pound. Mesir juga menerima hibah dari Bank dunia,

UNICEF, UNESCO dan Negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Negara-negara Arab lainnya (Ananda, 2018).

c. *Personalia*

Jumlah staf profesional dan staf pendukung di kementerian pendidikan terdapat hampir 2000 sorang. Pada tahun 1980 jumlah guru diperkirakan sebanyak 250.000 orang. Kemudian tahun 1990 hampir 390.000 guru yang mengajar di sekolah-sekolah Mesir. Selanjutnya sebanyak 55% menjadi tenaga pengajar di SD, 22% di Sekolah Menengah Pertama, dan 16% di Sekolah Menengah Atas. Namun hanya 17% menjadi tenaga pengajar di sekolah Al-Azhar. Dari data tersebut maka terlihat jumlah guru di Mesir termasuk cukup banyak, di antaranya guru pengampu pelajaran agama Islam, pengampu bahasa arab, pertanian, dan teknik serta guru pengampu bidang seni.

d. *Kurikulum dan Metodologi Pengajaran*

Penyusunan kurikulum di Mesir dilakukan dengan tim. Tim tersebut terdiri dari konsultan, para ahli, para profesor pendidikan, supervisor, dan beberapa guru-guru yang berpengalaman. Sebuah komite atau grup panitia dibuat untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, selanjutnya ketua komite atau panitia tersebut diikutsertakan dalam rapat koordinasi dengan pihak kementerian. Hasil rumusan kurikulum tersebut diserahkan oleh kepada dewan pendidikan pra universitas yang bertugas mengesahkan dan meresmikannya untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian perubahan dan penyesuaian kurikulum tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan daerah dengan situasi dan kondisi yang memerlukan kebijakan khusus.

Kemudian juga dilakukan pembentukan sebuah tim kecil untuk menulis buku teks yang sesuai dengan garis besar kurikulum yang ditentukan. Dalam aturan kurikulum buku teks tidak persis harus sama dengan kurikulum yang ditetapkan (Ahmad & Samsudin, 2017). Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul di lapangan seperti kondisi kelas, keterbatasan alat peraga dan perlengkapan, bervariasinya kualitas guru terkadang bertolak belakang dengan garis besar kurikulum ditambah lagi pada umumnya pembelajaran masih banyak bermetode verbal.

Selanjutnya terdapat pula berbagai badan atau lembaga komite penyusunan kurikulum yang bertugas untuk menyusun materi pembelajaran bekerja sama dengan para akademisi dan guru-guru yang tergabung dalam asosiasi sesuai dengan jurusan yang dipersiapkan. Dalam pelaksanaannya secara umum sekolah dan setiap guru mata pelajaran bebas menentukan materi yang diinginkannya.

e. *Sertifikasi, Ujian dan Kenaikan Kelas*

Untuk sertifikasi Pendidikan Dasar, Murid yang dinyatakan lulus mendapat sertifikat bias menggunakannya sebagai syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai jumlah skor sangat menentukan kualitas sekolah yang boleh dimasuki calon siswa, karena itu siswa Mesir sangat menginginkan perolehan skor yang tinggi

dalam sertifikatnya untuk bisa memasuki sekolah atau perguruan tinggi dengan kualifikasi yang diinginkannya. Sehingga hal itu menyiratkan penentuan masa depan siswa atau anak-anak Mesir digantungkan pada perolehan nilai ujian negara. Dan selanjutnya sistem ini menimbulkan nuansa persaingan yang agak tinggi di kalangan siswa.

Dengan demikian sistem ujian di Mesir terasa sangat membebani pikiran murid, orang tua serta para pejabat pendidikan dikarenakan hasil ujian yang berdampak sangat penting tersebut. Demikian pula dengan penetapan ujian naik kelas dilakukan sewaktu *Grade 2, 4, dan 5*, sebelum dilakukannya ujian negara pada *Grade 8*.

Begitu juga halnya dengan siswa-siswa yang hendak menamatkan pendidikan menengah, dikarenakan perolehan jumlah menentukan jenis fakultas dan universitas yang bias mereka masuki. Implikasi dari sistem ujian yang penuh persaingan ini memaksa siswa untuk belajar keras, namun efek negatif yang ditimbulkan munculnya perilaku menyontek dengan berbagai rupa modus serta hal tersebut menyuburkan tumbuhnya kursus-kursus (*les*) privat yang dikelola perorangan atau masyarakat (Ihsan, 2015).

#### f. Training Guru Inisiatif UNESCO Mesir

Dalam hubungan dengan lembaga PBB, Mesir membuka ruang bagi UNESCO (lembaga PBB bergerak dibidang pendidikan) untuk mengadakan pengembangan sistem pelatihan guru dalam rangka mendukung peningkatan SDM Mesir yang diinginkan. Untuk mendukung program sertifikasi keahlian guru pelatihan tersebut dilakukan dengan kerja sama dari perusahaan-perusahaan yang berperan dalam memberikan sertifikasi keahlian (Murtadlo, 2018). Kejelasan lebih lanjut bagaimana *impact* program tersebut sebagaimana akan diutarakan berikut ini:

- 1) Pemenuhan standar kompetensi internasional di samping standar nasional menjadi tujuan pelatihan pengembangan dan peningkatan keterampilan guru yang diselenggarakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut memberikan nilai tambah yang strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan di masa mendatang. Dengan pola peningkatan kompetensi guru demikian sejatinya bisa sesuai dengan Indonesia yang sekarang tengah giat dalam mewujudkan peningkatan pendidikan bermutu yang tidak hanya untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang telah dirumuskan namun juga untuk peningkatan kompetensi peserta didik sesuai standar internasional (Sukino, 2016). Artinya, dalam hal ini arah kebijakan pendidikan di Mesir boleh dikatakan mirip dengan sistem pendidikan di Indonesia, terkhusus dalam penyiapan *output* pendidikan yang kompetitif secara global.
- 2) Dengan jumlah penduduk yang padat dan mempunyai banyak institusi pendidikan siswa dan guru, pengembangan sistem pelatihan jarak jauh untuk peningkatan

keterampilan guru telah dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer atau jaringan jarak jauh. Model serupa juga bisa menjadi alternatif untuk dikembangkan di Indonesia yang juga memiliki luas dan kepadatan jumlah penduduk agar proses pelatihan guru dapat terlaksana dengan meluas serta efisien.

- 3) Secara fungsional, dalam penjenjangan karier guru di Mesir dilakukan lebih bertahap dan dapat menciptakan semangat profesionalisme guru. Urutan sistem karier guru mulai dari *assistant teacher*, *teacher*, *senior teacher*, sampai *master teacher*.

## B. Perbandingan Sistem Pendidikan Mesir dengan Indonesia

Perbandingan sistem pendidikan di antara Mesir dan Indonesia selanjutnya ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pendidikan

ASPEK PERBANDINGAN	MESIR	INDONESIA
<b>Filsafat Pendidikan</b>	Pengembangan sistem pendidikan ditujukan untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.	Filsafat Pancasila mendasari pengembangan pendidikan untuk terbentuknya masyarakat yang Pancasilais (Jurnal Filsafat, 2018).
<b>Politik dan Tujuan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merdeka dari Perancis 28 Februari 1922, Republik Mesir: 18 Juni 1953</li> <li>Pengembangan secara ilmiah dilakukan terhadap konsep, struktur, proses serta fungsi pendidikan</li> <li>Mengupayakan terwujudnya persamaan hak dan kesempatan, pendidikan seumur hidup menjadi tujuan pendidikan yang demokratis (Durhan, 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merdeka dari Belanda 17 Agustus 1945</li> <li>Pendidikan yang bermutu dan seumur hidup menjadi hak setiap warga negara</li> <li>Tujuan pendidikan membentuk masyarakat/ warga negara yang sesuai dengan butir-butir Pancasila (Rosidin &amp; Aeni, 2017)</li> </ul>
<b>Otoritas</b>	Sentralisasi, di bawah kementerian pendidikan dan kementerian Al-Azhar	Desentralisasi (tapi belum penuh, masih banyak otoritas pusat, di bawah Kementerian Pendidikan dan Agama
<b>Kurikulum dan Metode Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kurikulum dilakukan dengan adanya kerja sama tim yang terdiri dari para ahli, profesor, konsultan, dan supervisor pendidikan serta guru-guru yang telah berpengalaman.</li> <li>Tanggung jawab Pusat Pengembangan Pendidikan Nasional adalah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan materi pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum serta implementasi di lapangan.</li> <li>Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi diberikan banyak kebebasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa dan berkesesuaian dengan program pembangunan nasional, lingkungan, perkembangan Iptek serta seni.</li> <li>Setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan konten kurikulum yang diajarkan wajib memuat Pendidikan Agama, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan</li> <li>Dalam penyusunan kurikulum penanggung jawab kurikulum</li> </ul>

*Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia*

	<p>untuk merancang kurikulum serta pemakaian buku teks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis serta bahasa Jerman juga dijadikan pelajaran di sekolah menengah.</li> </ul>	<p>bernama Tim Kurikulum: BSNP menerima saran dari guru, akademisi kampus, masyarakat, dan dewan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum 2013 (Tematik untuk pendidikan dasar, kurikulum mata pelajaran untuk pendidikan menengah (Emalia &amp; Farida, 2019).</li> </ul>
<b>Sertifikasi dan Ujian kenaikan kelas</b>	<p>Penentuan kenaikan kelas dan kesempatan memasuki sekolah tujuan yang lebih tinggi sangat bergantung pada skor hasil ujian. Kenaikan kelas diujikan pada <i>grade</i> 2, 4, 5, dan pada akhir <i>grade</i> 8 dilakukan ujian negara utama. Sertifikat kelulusan diberikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.</p>	<p>Kenaikan kelas ditentukan dengan ujian yang didasarkan <i>grade</i>, sertifikat kompetensi diberikan dalam bentuk ijazah sebagai bukti sertifikasi.</p>
<b>Struktur dan jenjang pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pendidikan formal yang memiliki 2 struktur paralel yakni struktur keagamaan Al-Azhar dan struktur sekuler</li> <li>• Dalam struktur sekuler, wajib belajar di Mesir diberlakukan sampai <i>grade</i> 8 disebut dengan pendidikan dasar.</li> <li>• Dalam struktur sekolah Al-Azhar, secara umum hampir sama dengan sekuler ditingkat pendidikan dasar. Penekanan pelajaran agama Islam yang lebih menjadi perbedaan dengan sistem struktur sekuler</li> <li>• Pendidikan teknik dan vokasional untuk tingkat perguruan tinggi pada tahun 1988 terdapat 34 perguruan tinggi teknik dengan mahasiswa berjumlah 59.400 orang.</li> <li>• Pendidikan non-formal adalah kegiatan pendidikan terangkum dan terencana di luar daripada sistem pendidikan formal.</li> <li>• SD, SMP, SMA/SMK, PT (Gelar untuk S1 dan S2 belum digunakan dalam penulisan nama, melainkan untuk S3 (<i>Ad Duktur</i>), penulisan nama Prof dilakukan dengan <i>Al Ustadz, Ad Duktur</i> atau <i>Syaikh</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, untuk PT dari S1 sudah menggunakan gelar.</li> <li>• Di Indonesia PAUD pada Usia 3 s.d 5 th, SD 6-12 th, SMP 13-15 th, SLTA 16-18 th, serta saat mengikuti jenjang universitas pada usia 19 tahun.</li> </ul>
<b>Pendanaan.</b>	<p>Pada tahun 2013 pemerintah mengalokasikan kuota sebesar 17% untuk pembiayaan pendidikan Mesir dari APBN Mesir serta menerima bantuan dari lembaga atau Negara donor. Al-Azhar menggratiskan pendidikan untuk seluruh</p>	<p>Dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah dari APBN sebesar 20%</p>

	warga Mesir (M Nurul Ikhsan Saleh, 2015)	
<b>Kualitas pendidikan secara internasional</b>	Tidak tercatat mengikuti PISA s.d tahun 2007. Ikut TIMSS: rangking ke 41 dari 49 negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada PISA, 2019: rangking 72 dari 79 negara.</li> <li>• TIMSS 2007: rangking 35 dari 49 negara, TIMSS 2015 memperoleh rangking 6 terakhir</li> </ul>
<b>Pendidik (Guru)</b>	Teruji kualitasnya dengan ujian profesional sebelum menjadi pendidik dan pelatihan berstruktur dengan kerja sama UNESCO (ICT Standard Competency for Teachers). Dosen di Al Azhar harus magang di luar negeri min 2 tahun setelah Doktor.	S1 untuk guru SD, SMP & SMA S2 untuk dosen S1, S3 untuk dosen S2 ditambah Prof. untuk dosen S3. Peningkatan profesionalitas, cenderung swadana (beasiswa masih minim)
<b>Animo untuk studi lanjut</b>	Banyak pelajar Mesir melanjutkan pendidikan keluar negeri, di antaranya USA, Eropa dan untuk agama Al-Azhar menjadi prioritas.	Masih rendah jika dihitung dari jumlah penduduk keseluruhan usia kuliah, di antara kendala terbesar dalam melanjutkan studi ke luar negeri adalah persoalan bahasa.
<b>Pemerataan Pendidikan</b>	Sudah cukup merata di seluruh wilayah Mesir, kecuali di sekolah swasta	Masih terdapat daerah 3T yang belum memperoleh layanan pendidikan yang layak

Kemudian secara khusus akan dipaparkan juga bagaimana komparasi pendidikan dasar (SD) antara Mesir dengan Indonesia.

**Tabel 2.** Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar

ASPEK PERBANDINGAN	MESIR	INDONESIA
<b>1. Usia Belajar</b>	6 - 11 th	6 - 12 th
<b>2. Masa belajar</b>	5 th ( <i>grade</i> 1- 5)	6 th (kls 1- 6)
<b>3. Kalender akademik</b>	Bulan Sept s.d Agustus	Juli s.d Juni
<b>4. Biaya pendidikan</b>	Sekolah dasar Al-Azhar mendapat pembiayaan dari pemerintah, sekolah swasta mendapatkan subsidi	Sekolah negeri mendapat pembiayaan dari pemerintah, sekolah swasta mendapatkan subsidi
<b>5. Waktu pembelajaran</b>	Hari Ahad s.d Kamis, Jumat dan Sabtu libur. Jam belajar umumnya 6 jam per hari.	Senin s.d Sabtu, libur pada hari minggu. Pembelajaran umumnya berlangsung 6 jam per hari.
<b>6. Mata Pelajaran</b>	<p><i>Grade</i> 1 s.d <i>grade</i> 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al Qur'an</li> <li>• Bahasa Arab</li> <li>• Agama</li> <li>• Matematika</li> <li>• Olah raga</li> <li>• Seni</li> <li>• Imla'</li> <li>• Khot</li> <li>• Insya</li> </ul> <p><i>Grade</i> 4 s.d <i>grade</i> 5 mendapatkan penambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa Inggris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> <li>• Ilmu Pengetahuan Sosial</li> <li>• Ilmu Pengetahuan Alam</li> <li>• Matematika</li> <li>• Seni Budaya dan Keterampilan</li> <li>• Penjaskes</li> <li>• Muatan lokal.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologi</li> <li>• Sejarah</li> </ul>	
<b>7. Evaluasi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian dilakukan per <i>grade</i>, sekolah menentukan ujian dari <i>grade 1</i> sampai <i>grade 3</i></li> <li>• Untuk <i>grade 4</i>, ujian dengan soal dari pusat.</li> <li>• Soal subjektif berupa esai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian bersifat nasional</li> <li>• Kenaikan kelas ditentukan dari nilai harian, nilai sikap serta ujian semester</li> <li>• Bentuk Soal ujian nasional berupa objektif <i>multiple choice</i></li> </ul>
<b>8. Konsekuensi Ujian Negara</b>	Siswa tidak lulus ujian, diharuskan mengulang pelajaran pada <i>grade</i> yang siswa tidak lulus.	Jika tidak lulus UN tahap I, siswa harus ikut dalam UN tahap II. Jika masih tidak maka siswa dapat mengikuti KEJAR Paket A.
<b>9. Tujuan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mempersiapkan dan mengembangkan kompetensi anak-anak Mesir agar dapat beradaptasi dengan masyarakat masa depan yang modern serta siap dengan tantangan baru, Peserta didik dibekali kemampuan pemahaman dalam aspek religius, nasional, dan budaya sebagai identitas luhur (M Nurul Ikhsan Saleh, 2015).</li> <li>• Untuk siswa memiliki kompetensi dasar, berupa keterampilan membaca, menulis, berhitung, serta sains, bahasa dan matematika</li> <li>• Bertujuan membentuk warga yang memiliki pengetahuan tentang gizi, kesehatan, lingkungan, dan isu-isu pembangunan terbaru.</li> <li>• Mempersiapkan dan membantu siswa dalam pengembangan keterampilan yang dapat diajarkan berupa kemampuan berpikir kritis, analisis, keterampilan ilmiah, dan <i>problem solving</i> untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan pendidikan dituangkan dalam tujuan pembelajaran umum dalam silabus dari BSNP</li> <li>• Tujuan instruksional khusus yang dikembangkan oleh masing-masing guru.</li> </ul>
<b>10. Program pemerintah</b>	Pada kaum perempuan buta aksara cukup banyak (karena baru mulai ada pendidikan khusus untuk perempuan setelah tahun 1955)	Bebas buta aksara.
<b>11. Ekstra kurikuler.</b>	Tidak diprogramkan oleh sekolah, melainkan menjadi bagian dari pendidikan nonformal, seperti kursus memanah, berenang, berkuda, dll.	Pramuka.

Dari paparan yang terdapat dalam tabel di atas, selanjutnya dapat dijadikan *best practice* dan menjadi perbandingan dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia yaitu: *Pertama*, pemerintah Mesir cukup tinggi dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sebuah slogan di Mesir yang berbunyi “*Pendidikan merupakan hak setiap penduduk, seperti air dan udara.*” Hal tersebut dibuktikan dengan memilih guru-guru dengan seleksi pilihan yang terbaik untuk mengutamakan kualitas pembelajaran sebagai ujung tombak pendidikan.

*Kedua*, diperlukan adanya upaya keras dan simultan pada tiap Negara dalam menciptakan lulusan pendidikan yang siap diterima pasar dunia kerja. Pihak penerima pekerja akan diuntungkan sebagaimana sistem pendidikan Al-Azhar Kairo secara terbuka mengakomodasi calon mahasiswa dari berbagai lulusan sekolah menengah, namun calon siswa tetap diharuskan lulus seleksi dan mempunyai ijazah yang setara. Kemudian para calon mahasiswa yang masing-masing memiliki kekurangan kompetensi dasar diwajibkan mengikuti program matrikulasi sebelum memasuki kuliah. Sistem ini seharusnya bisa di adopsi di Indonesia, sehingga lulusan sekolah menengah mana pun harus tetap terseleksi secara kompetensi keagamaan begitu mereka memilih memasuki perguruan tinggi bercorak keagamaan seperti IAIN, UIN dan sebagainya.

*Ketiga*, di Mesir terdapat upaya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, agar kurikulum dapat diarahkan untuk memenuhi pokok kegiatan pembelajaran peserta didik. Kurikulum dapat dikembangkan secara mandiri dan kreatif oleh pendidik sesuai dengan potensi sarana dan prasarana yang tersedia di suatu satuan pendidikan dan kondisi daerah setempat (Ahmad & Samsudin, 2017). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan dengan Indonesia yang beragam, serta daerah kepulauan Indonesia yang membuat akses sarana dan prasarana pendidikan sampai saat ini belum merata. Berbeda dengan Mesir meskipun negaranya luas, namun hanya seperempatnya yang dihuni, selebihnya merupakan padang pasir.

Di samping kelebihan sistem pendidikan Mesir yang dapat dijadikan sebagai *best practice*, juga terdapat kelemahan dan persamaan dengan sistem pendidikan Indonesia antara lain: *Pertama*, Jika dibandingkan dengan kurikulum yang diterapkan di Mesir, maka kurikulum di Indonesia jauh lebih padat dan kompleks. Dengan demikian, Mesir lebih lambat dalam pemilihan peminatan dibanding di Indonesia, karena baru dimulai di tingkat PT. Dari segi kualitas pendidikannya secara internasional, Mesir tidak termasuk negara yang ikut serta dalam PISA, namun sampai dengan tahun 2007, Mesir masih ikut dalam TIMSS dengan pencapaian di bawah Indonesia, yakni rangking ke 41 dari 49 negara, sedangkan Indonesia rangking ke 35. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di

Mesir tidak memfokuskan pada aspek matematika dan sains, sehingga tahun 2011, 2015 dan 2019, Mesir tidak ikut lagi dalam ajang TIMSS.

*Kedua*, Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan metode *problem solving* merupakan metode unggulan dalam pembelajaran di Indonesia sejak penerapan Kurikulum KTSP 2006 hingga sampai sekarang dengan Kurikulum 2013. (Murtadlo, 2018) Hal ini sejalan dengan proses pendidikan di Mesir pada sekolah negeri maupun sekolah Al Azhar, yang juga menerapkan pembelajaran kontekstual, berbasis masalah, dan terpusat pada siswa.

*Ketiga*, Persoalan aspek kompetensi lulusan merupakan masalah pendidikan di Mesir, karena mereka menetapkan kompetensi lulusan secara nasional, namun belum tentu sesuai dengan kecenderungan minat anak. Demikian pula, di Indonesia permasalahan kompetensi lulusan ini secara dokumen telah mengalami banyak revisi, namun secara aplikatif masih belum mengalami perubahan yang signifikan.

*Keempat*, pemerataan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya berhasil alias masih menemui banyak kendala. Di antaranya adalah kesempatan mendapatkan pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, meskipun telah ditetapkan wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, pendanaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah juga belum memadai untuk pelaksanaan pendidikan yang layak dan berkualitas.

#### **IV. Kesimpulan**

Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, Mesir menekankan pada pelajaran agama yang bagus dan mempunyai sistem pembelajaran agama Islam yang kental. Pembelajaran pendidikan keislaman dilakukan dengan standar yang cukup tinggi untuk melahirkan lulusan pendidikan keagamaan yang memiliki kompetensi serta pengetahuan agama yang dalam. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Mesir sangat relevan untuk diperbandingkan dengan sistem pendidikan keagamaan Indonesia. Pendidikan guru keagamaan hanya boleh diselenggarakan oleh sistem sekolah Al-Azhar. Sekolah-sekolah Al-Azhar memiliki jumlah murid yang lebih sedikit dibandingkan sekolah sistem sekuler. Untuk pendidikan teknik tidak diselenggarakan oleh Al-Azhar. Namun terdapat hal yang berbeda pada data di lapangan yang menunjukkan jumlah tamatan sekolah Al-Azhar yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih besar dari pada sistem sekolah sekuler.

Selanjutnya dari segi manajemen sistem pendidikan Mesir telah banyak dilakukan terobosan-terobosan oleh pemerintahnya termasuk bekerja sama dengan UNESCO. Untuk kementerian Al-Azhar memiliki otoritas penuh untuk mengatur sistem sekolah yang berada di bawah lingkungannya. Demikian pula halnya dalam sistem pengembangan pelatihan guru terintegrasi yang terselenggara di Mesir juga dapat dijadikan model untuk

dikembangkan di Indonesia. Keterpaduan terkait layanan *training* dalam penyebaran informasi. Pelatihan juga mengadopsi penggunaan teknologi jarak jauh dan dalam pengembangan materi pelatihan, dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan UNESCO sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut dapat mencapai arah pengembangan dan peningkatan kompetensi guru serta bisa menciptakan efisiensi biaya pelatihan.

### Daftar Pustaka

- Abou- Warda, S. H. (2015). Entrepreneurial orientation in business schools: A comparative study of higher education systems in Egypt. *International Journal of Educational Management*, 29(2), 192–212. <https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2013-0165>
- Ahmad, F., & Samsudin, D. (2017). Kebergantungan Media Sosial Terhadap Isu Arab Spring Dalam Kalangan Khalayak di Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 33(1), Article 1. <http://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/16974>
- Ananda, A. (2018). *Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara*. IPPM Universitas Bung Hatta.
- Durhan, D. (2019). INTERNALISASI KONSEP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Belajar dari Praktik Demokrasi dalam Pendidikan Islam di Pakistan, Mesir dan Turki). *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.31102/ahsana.5.1.2019.50-59>
- El Nagdi, M., & Roehrig, G. (2020). Identity evolution of STEM teachers in Egyptian STEM schools in a time of transition: A case study. *International Journal of STEM Education*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00235-2>
- Emalia, E., & Farida, F. (2019). INOVASI PENDIDIKAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM UPAYA MENYONSONG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*, 0(0), Article 0. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2984>
- Ihsan, M. N. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.49-70>
- Ilyas, S. D. (2017). وسطية التربية الإسلامية وانعكاساتها في المناهج الدراسية الأزهرية. *ALQALAM*, 34(1). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i1.738>
- Maman, Y., & Falah, J. F. (2018). "Education Ltd."—The Influence of British Earl of Cromer on the Education System in Egypt (1883-1907). *Advances in Historical Studies*, 07(02), 79–96. <https://doi.org/10.4236/ahs.2018.72006>
- Murtadlo, M. (2018). HUBUNGAN MESIR-INDONESIA DALAM MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.530>
- Nur, A. S. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Lubuk Agung.
- Rosidin, R., & Aeni, N. (2017). PEMAHAMAN AGAMA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN: Studi Kasus pada Organisasi Rohis SMA Negeri 1 Sragen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(2). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i2.620>
- Saleh, M. N. I. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 49–70. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.49-70>

- Saudi, A. (2020). The Strategies of Developing Pre-University Education in Egypt In the Light of The Experiences of Some Foreign Countries. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION METHODOLOGY*, 11, 22–30. <https://doi.org/10.24297/ijrem.v11i.8595>
- Stopikowska, M., & El-Deabas, Y. M. (2012). THE EDUCATION SYSTEM OF EGYPT: CONTEXTS, FRAMES AND STRUCTURES. *Problems of Education in the 21st Century*, 40.
- Sukino, A. (2016). DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TRANSFORMASI KEILMUAN ULAMA NUSANTARA. *Studia Didaktika*, 10(01), 28–39.